

Pemodelan Proses Penyusunan Laporan Keberlanjutan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Putu Sukma Kurniawan

Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia.
Email: putusukma@undiksha.ac.id

Abstrak

Sustainability reporting becomes a new paradigm in corporate reporting. Sustainability reporting demonstrates that management of company have a commitment to engage in business activities, building on the concept of sustainability. This article discusses the implementation of the sustainability reporting on a small and medium enterprises, especially in Indonesia. The discussion is done on the opportunities and challenges of sustainability reporting in small and medium enterprises. Implementation of sustainability reporting in small and medium enterprises adapted to the GRI G4 standard.

Keywords: sustainability reporting, sustainability report, small and medium enterprises, GRI G4 standard

PENDAHULUAN

Pelaporan informasi dalam laporan keberlanjutan (sustainability report) kini menjadi paradigma yang baru dalam pelaporan perusahaan. Bentuk penyampaian informasi pada laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan bisnis perusahaan dalam konsep keberlanjutan. Konsep keberlanjutan memiliki pengertian bahwa segala aktivitas bisnis perusahaan tidak hanya memikirkan pemangku kepentingan di dalam perusahaan saja tetapi juga memikirkan dampak bisnis perusahaan kepada pemangku kepentingan di luar perusahaan. Borga et al. (2009) berpendapat bahwa perubahan atau evolusi terbaru dalam konteks ekonomi dan sosial telah menyebabkan manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan dan menilai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Semua jenis industri pada dasarnya dapat melakukan penyampaian informasi melalui laporan keberlanjutan. Telah banyak penelitian-penelitian yang membahas mengenai penyampaian informasi pada laporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar. Pada beberapa perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang besar, penyampaian informasi pada laporan keberlanjutan menjadi hal yang mutlak disebabkan oleh banyak faktor, misalnya untuk mempertahankan legitimasi perusahaan dan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan perusahaan. Topik-topik pada laporan keberlanjutan masih berfokus mengenai faktor-faktor dan pengaruh pelaporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang besar atau pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Pembahasan mengenai laporan keberlanjutan akan terus berkembang seiring dengan perubahan paradigma bisnis yang saat ini berkonsep bisnis yang bertanggung jawab (responsible business). Bisnis yang bertanggung jawab dapat diartikan bahwa manajemen perusahaan berupaya untuk meminimalisir dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Penulis meyakini bahwa kedepannya konsep bisnis yang bertanggung jawab ini tidak hanya akan menjadi perhatian serius dari manajemen perusahaan yang terdaftar di pasar modal saja, akan tetapi juga menjadi perhatian dari para pelaku bisnis usaha kecil dan menengah (UKM). Pelaporan keberlanjutan dapat membantu untuk meningkatkan keberlangsungan usaha karena dengan melakukan pelaporan keberlanjutan pelaku bisnis UKM dapat menilai kinerja internal bisnis (kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan) dan sekaligus dapat pula membangun kepercayaan pihak-pihak di luar UKM bahwa bisnis UKM tersebut dijalankan dengan konsep bisnis yang bertanggung jawab. Memang harus disadari bahwa kompleksitas bisnis UKM tidak setinggi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal sehingga kita dapat berpendapat bahwa UKM tidak perlu menyampaikan informasi mengenai laporan keberlanjutan. Tetapi jika kita ingin konsep bisnis yang bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik, maka seharusnya semua pihak dalam lingkungan bisnis menjalankan konsep bisnis yang bertanggung jawab. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu komponen dalam lingkungan bisnis sehingga berdasarkan pemahaman ini maka UKM pun seharusnya dapat melakukan bisnis yang bertanggung jawab. Salah satu

cara UKM untuk melakukan bisnis yang bertanggung jawab dan berdasarkan pada konsep keberlanjutan adalah dengan menyampaikan informasi aktivitas bisnis UKM melalui laporan keberlanjutan.

Artikel ini didasarkan pada tulisan Castka et al. (2004) yang meneliti mengenai pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan oleh UKM di Inggris. Hasil penelitian Castka et al. (2004) menemukan bahwa agenda CSR telah dilakukan oleh UKM di Inggris dengan berpedoman pada ISO 9001: 2000. Dengan kata lain bahwa UKM telah memiliki kepedulian untuk melakukan tanggung jawab sosial. Meskipun tren melakukan kegiatan CSR bagi UKM di Indonesia belum terlihat, tetapi setidaknya di masa depan UKM akan memiliki kepedulian yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Kepedulian yang tinggi dalam kegiatan CSR akan mendorong UKM untuk melaporkan aktivitas CSR tersebut melalui laporan keberlanjutan. Penulisan artikel ini juga didasarkan pada penelitian Arena & Azzone (2012) yang membahas mengenai pendekatan teoretis dalam pelaporan keberlanjutan UKM dengan mempertimbangkan kekhususan UKM tersebut. Pendekatan yang diusulkan oleh Arena & Azzone (2012) dapat meminimalisir masalah yang dihadapi oleh UKM dalam melakukan pelaporan keberlanjutan. Penulisan artikel ini juga dimotivasi oleh tulisan Borga et al. (2009) yang mencoba untuk mengembangkan sebuah pedoman untuk menilai proses keberlanjutan di dalam UKM. Beberapa item-item pedoman yang dikembangkan oleh Borga et al. (2009) sangat sesuai dengan lingkungan bisnis UKM dan karakteristik dari UKM.

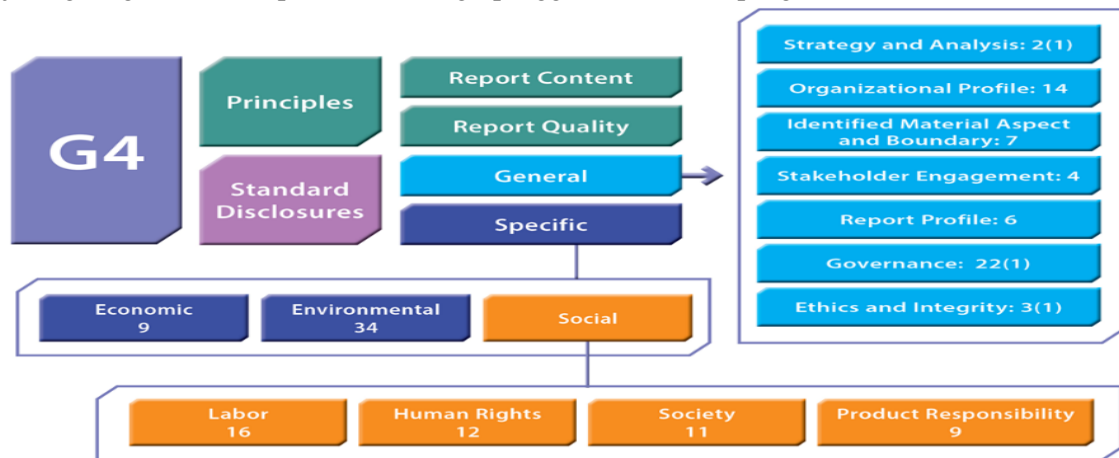
Melalui artikel ini penulis mencoba untuk membahas mengenai bagaimana bentuk model implementasi proses penyusunan laporan keberlanjutan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Artikel ini merupakan artikel konseptual yang didasarkan pada pemikiran penulis dengan dukungan dari literatur-literatur yang ada. Pembahasan artikel ini mencakup peluang dan tantangan UKM dalam melakukan pelaporan keberlanjutan dan bentuk implementasi pelaporan keberlanjutan UKM yang sesuai dengan standar GRI G4 (standar GRI generasi keempat). Standar GRI G4 dipergunakan dalam implementasi karena merupakan sebuah standar yang baku dalam pelaporan keberlanjutan dan poin-poin pada standar GRI G4 telah mencerminkan nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai lingkungan yang telah sesuai dengan konsep keberlanjutan. Secara umum standar GRI G4 terdiri dari dua bagian utama, yaitu Prinsip GRI G4 yang memuat mengenai isi laporan dan kualitas laporan dan Standar Pengungkapan GRI G4 yang mencakup pengungkapan umum dan pengungkapan khusus. Penulis akan mencoba untuk membuat pemodelan bagaimana proses penyusunan laporan keberlanjutan UKM dengan berpedoman pada standar GRI G4.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Laporan Keberlanjutan dan Kerangka Kerja GRI G4

Laporan keberlanjutan (sustainability report) merupakan bentuk penyampaian informasi yang komprehensif dari manajemen perusahaan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Informasi yang komprehensif dapat diartikan informasi keuangan dan informasi non keuangan. Laporan keberlanjutan didasarkan pada konsep triple bottom lines dimana perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan semata (profit) tetapi pula harus memikirkan kepentingan sosial (people) dan lingkungan (planet). Informasi yang komprehensif dapat pula diartikan sebagai informasi yang menyajikan kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan perusahaan. Secara umum penyusunan laporan keberlanjutan didasarkan pada pedoman GRI G4 yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Prinsip pelaporan yang terkandung dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan haruslah mengandung isi dan kualitas yang baik. Isi dari laporan ditentukan dari tingkat materialitas, kelengkapan, mencakup kepentingan pemangku kepentingan, dan mencakup konteks keberlanjutan. Sedangkan kualitas laporan dapat dilihat dari tingkat akurasi, dapat diperbandingkan, dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Dalam standar GRI G4 terdapat dua jenis pengungkapan standar, yaitu pengungkapan umum dan pengungkapan khusus. Pengungkapan umum memuat mengenai strategi dan analisis perusahaan, profil perusahaan, identifikasi aspek material bagi perusahaan, hubungan dengan pemangku kepentingan, profil laporan, dan tata kelola perusahaan. Sedangkan pengungkapan khusus mencakup pengungkapan mengenai kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Contoh pengungkapan kinerja ekonomi, misalnya manfaat ekonomi langsung yang diterima pemangku kepentingan dan kinerja ekonomi perusahaan. Pengungkapan kinerja sosial dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengungkapan

mengenai pekerja, hak asasi manusia, komunitas sosial, dan tanggung jawab atas produk. Pengungkapan kinerja lingkungan mencakup efisiensi energi, penggunaan air, dan pengelolaan limbah.



Gambar 1. Kerangka kerja GRI G4

Sumber: NCSR (2017)

Penelitian Terdahulu Mengenai Laporan Keberlanjutan pada UKM

Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan pelaporan keberlanjutan ataupun mengenai aktivitas tanggung jawab sosial pada UKM. Bos-Brouwers (2010) meneliti mengenai laporan keberlanjutan pada UKM dengan menggunakan studi kasus pada usaha meuble. Lawrence et al. (2006) meneliti mengenai praktek pelaporan keberlanjutan pada UKM di Selandia Baru dengan membahas akuntabilitas mengenai dampak sosial dan lingkungan dari bisnis yang dijalankan. Arena & Azzone (2012) melakukan pendekatan dalam pembuatan laporan keberlanjutan pada UKM dengan melihat kekhususan bisnis yang terdapat pada UKM. Hasil penelitian Longo et al. (2005) berkontribusi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai komitmen sosial yang dilakukan oleh pelaku bisnis UKM. Selain itu Longo et al. (2005) juga menganalisis mengenai karakteristik CSR yang dilakukan oleh pelaku bisnis UKM dan mengidentifikasi kegiatan CSR yang dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai sosial dari bisnis UKM. Kocmanova et al. (2011) memfokuskan pembahasan pada kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan pada keberlangsungan bisnis UKM di Republik Ceko. Kocmanova et al. (2011) menyimpulkan kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan yang dilakukan oleh UKM dapat berdampak pada keberlangsungan usaha UKM. Borga et al. (2009) mengembangkan sebuah pendekatan pedoman bagi UKM dalam melakukan pelaporan keberlanjutan. Sampel perusahaan yang dipergunakan dalam studi kasus Borga et al. (2009) adalah perusahaan perusahaan-perusahaan furniture di Italia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

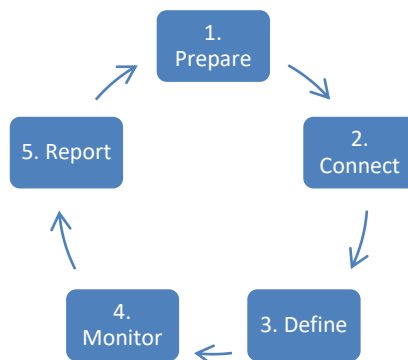
Peluang dan Manfaat UKM dalam Melakukan Pelaporan Keberlanjutan

Menarik untuk mencermati pendapat Perrini (2006) yang menyatakan bahwa CSR pada perusahaan-perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar harus didasarkan pada stakeholder theory, sedangkan CSR yang dilakukan pada UKM harus didasarkan pada konsep modal sosial. Hal ini sangat menarik untuk dicermati karena memang kepentingan perusahaan pada industri besar dengan UKM sangatlah berbeda. Perusahaan dengan ukuran yang besar melakukan aktivitas CSR karena membutuhkan legitimasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar keberlangsungan usaha perusahaan dapat terus berlanjut. Beberapa literatur pun menjelaskan bahwa terkadang motivasi perusahaan besar dalam melakukan CSR hanyalah sekedar pencitraan. Sarbutts (2003) berpendapat bahwa pelaksanaan CSR dapat berjalan efektif dan lebih dari sekedar kegiatan untuk pencitraan manajemen perusahaan dan menyimpulkan bahwa dalam beberapa hal UKM dapat mengambil

keuntungan dari kegiatan CSR yang dilaksanakan. Evans & Sawyer (2010) mengidentifikasi bahwa pada dasarnya pemangku kepentingan bisnis UKM yang paling utama adalah komunitas lokal yang berada di sekitar UKM tersebut. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh UKM memiliki makna yang positif karena kegiatan tersebut bermanfaat untuk komunitas lokal. Demikian pula komunitas lokal akan memberikan dampak yang positif kepada keberlangsungan bisnis UKM. Jika identifikasi yang dilakukan oleh Evans & Sawyer (2010) ini digabungkan dengan pendapat Perrini (2006) maka kita akan mendapatkan pemahaman bahwa pelaku bisnis UKM menjalin hubungan dengan komunitas lokal berdasarkan modal sosial yang dimiliki. Bos-Brouwers (2010) berpendapat bahwa komitmen untuk membuat laporan keberlanjutan akan membentuk UKM melahirkan inovasi yang berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan proses teknologi sehingga akan menghasilkan eko-efisiensi. Selain itu peningkatan pada proses teknologi akan dapat menurunkan biaya produksi. Memang harus disadari bahwa kompleksitas bisnis UKM tidak setinggi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal sehingga ada beberapa yang berpendapat bahwa UKM tidak memerlukan penyampaian informasi melalui laporan keberlanjutan. Pendapat ini setidaknya mungkin kurang tepat jika didasarkan pada banyak penelitian terdahulu yang dilakukan, misalnya penelitian Arena & Azzone (2012) dan Borga et al. (2009). Bisnis UKM merupakan bagian dari lingkungan bisnis yang besar dan di saat paradigma bisnis saat ini menganut konsep bisnis yang berkelanjutan, maka selalu ada peluang UKM untuk menjalankan konsep bisnis yang berkelanjutan.

Model Implementasi Pedoman GRI G4 Pada Pelaporan Keberlanjutan UKM

Tentu saja penyampaian informasi pada laporan keberlanjutan UKM tidak akan sekompleks penyampaian pelaporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang besar. Inti dari pembuatan pelaporan keberlanjutan UKM cukup hanya untuk menunjukkan bahwa aktivitas bisnis UKM mendukung konsep keberlanjutan. Penulis berpendapat bahwa konsep keberlanjutan tidak hanya diaplikasikan oleh perusahaan pada industri yang besar, namun UKM pun dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan berlandaskan konsep keberlanjutan. NCSR (2017) memberikan sebuah model proses pelaporan keberlanjutan yang menggunakan standar GRI G4 dalam pembuatan laporan keberlanjutan. Secara umum model proses pelaporan keberlanjutan tersebut terdiri dari 5 tahapan, yaitu (1) prepare, (2) connect, (3) define, (4) monitor, dan (5) report. Jika digambarkan maka proses pelaporan keberlanjutan, yaitu



Gambar 2. Proses pelaporan keberlanjutan

Sumber: NCSR (2017)

Tahap prepare merupakan tahap awal dalam proses pelaporan keberlanjutan. Tahap ini dipergunakan untuk menentukan bentuk laporan dan memilih pendekatan yang akan dipergunakan dalam laporan keberlanjutan. Dalam tahap ini pelaku bisnis UKM dapat menentukan bagaimana bentuk dan isi laporan nantinya. Pada tahap ini dapat juga dibentuk sebuah tim yang akan menyusun rencana pelaporan keberlanjutan. Pada tahap connect maka pelaku bisnis UKM harus mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan mana yang paling membutuhkan laporan keberlanjutan. Dalam konteks ini maka

pelaku bisnis UKM akan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Tahap berikutnya adalah define dimana pada tahap ini pelaku bisnis UKM harus mampu menilai aspek-aspek mana yang bersifat material dan harus disajikan dalam laporan keberlanjutan. Tingkat materialitas informasi dapat ditentukan pula dari informasi-informasi mana yang paling penting dan paling diperlukan oleh pemangku kepentingan perusahaan. Tahap selanjutnya adalah monitor dimana pada tahap ini pelaku bisnis UKM harus menilai apakah draft laporan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan. Pada tahap ini juga dapat dibuat daftar-daftar informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan. Tahap terakhir adalah report yang merupakan tahap mengeluarkan laporan keberlanjutan. Untuk mendukung tahap ini, pelaku bisnis UKM dapat melakukan sebuah komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui sebuah diskusi untuk melihat informasi-informasi yang disajikan. Ini juga dapat menjadi sebuah bentuk evaluasi untuk perbaikan laporan keberlanjutan pada tahun berikutnya.

Pemodelan implementasi pelaporan keberlanjutan pada UKM dalam artikel ini didasarkan pada proses pelaporan keberlanjutan yang dibentuk oleh NCSR (2017). Akan dicoba untuk dibentuk model proses penyusunan laporan keberlanjutan yang sesuai pada UKM. Pemodelan proses penyusunan laporan keberlanjutan pada UKM dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:

Tahap Prepare

Menentukan pendekatan pelaporan yang akan digunakan

Pada umumnya dalam penyusunan laporan keberlanjutan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan “core” dan pendekatan “comprehensive”. Pendekatan “core” berarti bahwa tidak semua poin-poin dalam standar GRI G4 akan disampaikan di dalam laporan keberlanjutan, sedangkan pendekatan “comprehensive” berarti bahwa semua poin-poin dalam standar GRI G4 akan disampaikan pada laporan keberlanjutan. Penentuan pendekatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk memenuhi standar GRI G4. Dalam konteks ini kita harus memahami bahwa tingkat kompleksitas UKM tidak setinggi perusahaan dalam industri yang besar. Dengan demikian dalam penyusunan laporan keberlanjutan UKM kita dapat mempergunakan pendekatan “core”. Pendekatan “core” dipilih dengan asumsi bahwa sumber daya yang dimiliki UKM belum mampu mendukung untuk pelaporan keberlanjutan dengan memasukkan semua poin-poin dalam standar GRI G4.

Menentukan indikator-indikator pada pengungkapan standar umum dan pengungkapan standar khusus

Ketika pendekatan laporan yang dipilih adalah “core” maka setidaknya terdapat satu aspek yang harus diungkapkan dalam pengungkapan standar umum dan pengungkapan standar khusus. Misalnya dalam pengungkapan standar umum, pelaku bisnis UKM dapat mengungkapkan informasi mengenai strategi bisnis UKM, profil organisasi, pemangku kepentingan yang dianggap penting, dan prinsip-prinsip pelaporan. Sedangkan dalam pengungkapan standar khusus pelaku bisnis UKM dapat mengungkapkan paling sedikit satu indikator dari masing-masing aspek yang terdapat pada setiap kategori. Terdapat tiga kategori dalam pengungkapan standar khusus, yaitu kategori ekonomi yang mencakup empat aspek, kategori lingkungan yang mencakup dua belas aspek, dan kategori sosial yang mencakup tiga puluh aspek. Dalam konteks UKM, maka pelaku bisnis harus mampu menentukan indikator yang akan diungkapkan yang disesuaikan dengan kondisi nyata UKM. Dalam tahap ini pelaku bisnis UKM dapat mempergunakan dokumen-dokumen atau standar operasional prosedur yang berlaku di UKM. Dokumen-dokumen ini nantinya dapat mendukung memberikan informasi indikator-indikator mana saja yang akan disajikan dalam laporan keberlanjutan

Tahap Connect

Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap bisnis UKM

Pada tahap ini maka pelaku bisnis UKM harus melakukan identifikasi pemangku kepentingan mana saja yang memiliki pengaruh atau dampak dari aktivitas bisnis UKM. Pemangku kepentingan dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang berhubungan dengan UKM dan dapat terkena dampak dari aktivitas bisnis UKM. Jika didasarkan pada pendapat Evans dan Sawyer (2010) maka pemangku kepentingan yang paling berpengaruh dan memiliki dampak yang tinggi adalah komunitas lokal yang terdapat di lingkungan bisnis UKM. Pelaku bisnis UKM juga harus mengidentifikasi pemangku kepentingan lain yang berpengaruh, dalam konteks ini misalnya pemerintah. Identifikasi pemangku kepentingan ini

sangat penting karena akan berpengaruh terhadap jenis-jenis informasi yang akan disajikan dalam laporan keberlanjutan.

Tahap Define

Menentukan aspek materialitas

Pada tahap ini pelaku bisnis UKM menentukan tingkat materialitas dari aktivitas bisnis UKM. Tingkat materialitas yang dimaksud adalah seberapa tinggi dampak yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis UKM khususnya kepada pemangku kepentingan UKM. Jika suatu aktivitas bisnis UKM memiliki dampak yang tinggi (memiliki materialitas yang tinggi), maka aktivitas bisnis tersebut dan dampaknya harus disajikan di dalam laporan keberlanjutan. Salah satu cara untuk menentukan aspek materialitas adalah membuat sebuah daftar atau tabel yang berisi aktivitas bisnis perusahaan dan dampaknya (dampak positif dan dampak negatif) serta pengaruhnya kepada pemangku kepentingan UKM. Beberapa indikator yang dapat bersifat material bagi lingkungan bisnis UKM, misalnya tanggung jawab terhadap produk, pengelolaan limbah, penggunaan air dan energi, dan kesejahteraan karyawan. Menentukan aspek materialitas juga bisa didasarkan pada prioritas terhadap pemangku kepentingan. Pelaku bisnis UKM dapat menentukan pemangku kepentingan mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan kebutuhan informasi mengenai pemangku kepentingan inilah yang paling banyak akan disajikan di dalam laporan keberlanjutan.

Tahap Monitor

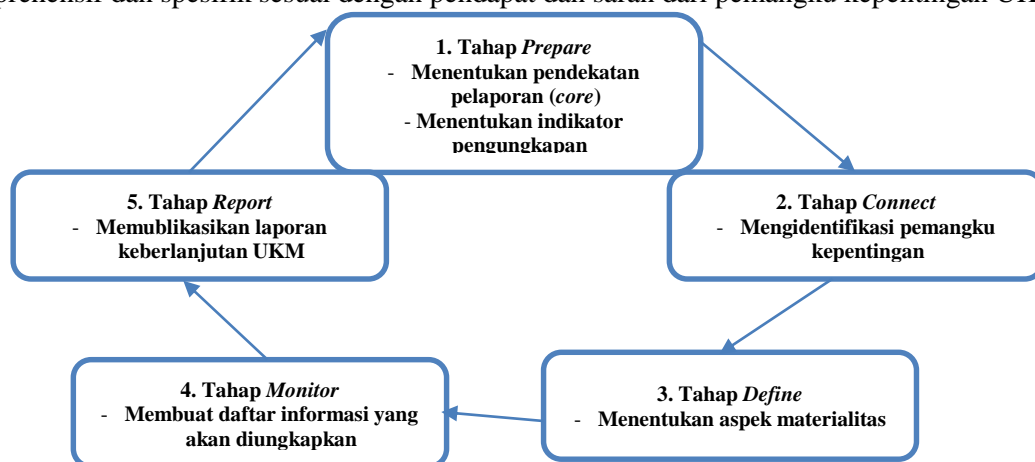
Membuat daftar informasi yang akan diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan

Pada tahap ini pelaku bisnis UKM dapat membuat sebuah daftar yang berisikan informasi-informasi apa saja yang akan diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan. Tentu saja informasi-informasi ini adalah informasi yang bersifat material dan dibutuhkan oleh pemangku kepentingan UKM. Informasi-informasi yang akan dimasukkan ke dalam daftar dapat berupa (1) informasi yang memiliki materialitas, (2) informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan (3) informasi yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan usaha UKM.

Tahap Report

Memublikasikan laporan keberlanjutan UKM

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pelaporan keberlanjutan. Pada tahap ini pelaku bisnis UKM dapat memublikasikan laporan keberlanjutan kepada pemangku kepentingan. Pada tahap ini komunikasi dapat dibangun dengan para pemangku kepentingan UKM, misalnya pemerintah dan komunitas lokal. Pelaku bisnis UKM dapat menilai tingkat efektivitas informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan. Pada tahap ini pelaku bisnis UKM dapat meminta pendapat dan saran dari pemangku kepentingan. Pendapat dan saran ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pembuatan laporan keberlanjutan di tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya dapat saja laporan keberlanjutan UKM masih menggunakan pendekatan “core” tetapi informasi yang disajikan dapat lebih komprehensif dan spesifik sesuai dengan pendapat dan saran dari pemangku kepentingan UKM.



Gambar 3. Model penyusunan laporan keberlanjutan pada UKM

Model penyusunan laporan keberlanjutan pada UKM ini pada dasarnya berlaku untuk semua jenis bisnis UKM. Hal ini karena langkah-langkah pada masing-masing tahap dapat diaplikasikan pada semua jenis bisnis UKM. Beberapa perbedaan yang mungkin terjadi, misalnya (1) perbedaan menentukan indikator pengungkapan yang didasarkan pada jenis usaha UKM, (2) perbedaan pada identifikasi pemangku kepentingan, dan (3) perbedaan saat menentukan aspek materialitas.

Hambatan dan Tantangan UKM di Indonesia dalam Melakukan Pelaporan Keberlanjutan

Lingkungan bisnis dapat mendorong dan membentuk motivasi UKM untuk melakukan penyampaian informasi melalui laporan keberlanjutan. Jika semua lingkungan bisnis berpendapat bahwa penyampaian informasi melalui laporan keberlanjutan sangat penting, maka setiap komponen dalam lingkungan bisnis tersebut akan memiliki motivasi untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Harus disadari pula bahwa UKM di Indonesia memiliki hambatan dan tantangan untuk melakukan penyampaian informasi melalui laporan keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia terdapat beberapa hambatan dan tantangan UKM dalam melakukan pelaporan keberlanjutan. Hambatan dan tantangan tersebut, yaitu:

- Belum adanya motivasi untuk melakukan pelaporan keberlanjutan

Dalam konteks ini kita harus memahami bahwa belum ada motivasi UKM untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Baik itu motivasi yang berasal dari internal maupun motivasi yang berasal dari eksternal. Penulis sampai saat ini belum mengetahui mengenai aturan-aturan yang mengharuskan UKM di Indonesia untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Terlebih lagi saat ini pemerintah masih berfokus pada usaha pengembangan bisnis UKM dengan memberikan bantuan modal usaha dan pengurangan tarif pajak. Kedepannya kita dapat berharap bahwa jika UKM di Indonesia telah berkembang dengan baik, pelaku bisnis UKM akan memiliki motivasi untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Tentu saja motivasi ini dapat berasal dari internal maupun dari eksternal UKM.

- Belum memiliki sumber daya yang mendukung untuk melakukan pelaporan keberlanjutan

Harus disadari bahwa dalam pembuatan sebuah laporan keberlanjutan harus didukung oleh sumber daya yang cukup. Termasuk sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keberlanjutan dan biaya yang dibutuhkan dalam penyajian informasi dalam laporan keberlanjutan. Castka et al. (2004) menyatakan bahwa sumber daya keuangan yang diinvestasikan dalam kegiatan CSR oleh UKM masih terbatas. Dengan kegiatan CSR yang terbatas, maka kemampuan UKM untuk melakukan pelaporan keberlanjutan pun akan terbatas pula. Dengan pemahaman ini maka kecenderungan pelaku bisnis UKM untuk melakukan pelaporan keberlanjutan akan semakin kecil. Umumnya juga investasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis UKM memiliki tingkat pengembalian pada jangka waktu yang panjang.

- Pelaku bisnis UKM masih berfokus bagaimana pengembangan bisnis UKM agar profitabilitas UKM tinggi

Dalam konteks Indonesia, pelaku bisnis UKM masih berfokus dalam strategi untuk mengembangkan usahanya sehingga profitabilitas nantinya akan semakin tinggi. Paradigma ini tentu saja dapat mengurangi keinginan pelaku bisnis UKM untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Mungkin saja dalam aktivitas bisnis UKM telah melaksanakan konsep-konsep keberlanjutan, tetapi karena paradigma masih berfokus pada profit yang tinggi, hal ini akan mengurangi keinginan UKM untuk memublikasikan aktivitas bisnis tersebut dalam laporan keberlanjutan. Hal ini disadari juga karena proses pelaporan keberlanjutan memerlukan biaya yang tidak besar dan hal ini turut pula membuat pelaku bisnis UKM untuk tidak berpikir memasukkan pelaporan keberlanjutan dalam fokus bisnis UKM.

- Belum adanya standar atau pedoman di Indonesia mengenai pelaporan keberlanjutan untuk UKM

Untuk saat ini standar atau pedoman untuk pelaporan keberlanjutan masih berfokus untuk perusahaan dimana standar yang dipergunakan adalah GRI G4. Pelaporan keberlanjutan masih berada dalam ranah perusahaan karena perusahaan dianggap memiliki kepentingan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Dalam konteks internasional, isu mengenai pelaporan keberlanjutan untuk SMEs (small and medium enterprises) telah menjadi isu yang menarik dimana

banyak penelitian telah dilakukan untuk menilai apakah SMEs memiliki kemampuan untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Konsep standar atau pedoman pelaporan keberlanjutan SMEs sedang dikembangkan oleh GRI. GRI mengembangkan konsep standar atau pedoman pelaporan keberlanjutan yang nantinya dapat dipergunakan oleh SMEs untuk membuat laporan keberlanjutan. Penulis berharap nantinya di Indonesia terdapat sebuah standar atau pedoman bagi UKM dalam melakukan proses pelaporan keberlanjutan.

- Pemangku kepentingan bisnis UKM yang tidak memiliki kompleksitas yang tinggi

Perusahaan dengan ukuran besar atau terdaftar di pasar modal akan memiliki pemangku kepentingan yang banyak dengan keragaman tingkat kepentingan. Laporan keberlanjutan dalam konteks perusahaan ini akan sangat bermanfaat untuk membangun hubungan dengan semua pemangku kepentingan. Hal ini kemudian dibandingkan dengan bisnis UKM yang pada faktanya kompleksitas bisnisnya belum setinggi perusahaan-perusahaan dengan ukuran besar. Berdasarkan pemahaman penulis, penulis berpendapat bahwa pemangku kepentingan UKM yang paling berpengaruh adalah pemerintah dan komunitas lokal. Fakta ini yang mungkin akan membuat pelaku bisnis UKM enggan untuk membuat sebuah laporan keberlanjutan. Terlebih lagi belum ada tekanan dari pemangku kepentingan UKM (pemerintah dan komunitas lokal) yang mengharuskan UKM untuk melakukan pelaporan keberlanjutan.

SIMPULAN

Pelaporan keberlanjutan dapat menunjukkan adanya komitmen pemilik perusahaan terhadap bisnis yang berkelanjutan. Penyampaian informasi melalui laporan keberlanjutan memberikan pemahaman bagi pemilik perusahaan (pemilik UKM) bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya ditentukan oleh kinerja ekonomi UKM saja, namun juga ditentukan oleh kinerja sosial dan kinerja lingkungan UKM. Perlu dipahami bahwa lingkungan bisnis UKM masuk dalam lingkungan bisnis secara keseluruhan dan aktivitas bisnis UKM pun dapat dijalankan dengan konsep keberlanjutan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business*). Untuk saat ini memang belum ada pedoman atau standar mengenai pelaporan keberlanjutan untuk UKM. Penulis berharap UKM di Indonesia nantinya dapat terus berkembang dan pada akhirnya melakukan pelaporan keberlanjutan akan menjadi kebutuhan bagi keberlangsungan usaha UKM.

Keterbatasan artikel ini adalah artikel ini masih bersifat konseptual dan belum didasarkan pada kondisi di lapangan mengenai UKM yang ada di Indonesia. Penulis masih menggunakan beberapa asumsi dalam pemodelan implementasi pelaporan keberlanjutan bagi UKM dan belum memasukkan variabel-variabel yang sesuai dengan kondisi nyata bisnis UKM di Indonesia. Artikel selanjutnya dapat membahas mengenai penerapan pelaporan keberlanjutan pada UKM yang memang telah melakukan pelaporan keberlanjutan meskipun dalam pembuatan laporan keberlanjutannya belum menggunakan standar pelaporan tertentu. Jika memang terdapat UKM di Indonesia yang telah melakukan pelaporan keberlanjutan meskipun dalam bentuk yang masih sederhana, ini akan dapat meningkatkan pemahaman kita bahwa pada dasarnya pelaporan keberlanjutan sangat penting bahkan bagi UKM yang tingkat kompleksitas bisnisnya belum terlalu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arena, M., & Azzone, G. (2012). A process-based operational framework for sustainability reporting in SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 19(4), 669-686.
- Borga, F., Citterio, A., Noci, G., & Pizzurno, E. (2009). Sustainability report in small enterprises: case studies in Italian furniture companies. *Business Strategy and the Environment*, 18(3), 162-176.
- Bos-Brouwers, H. E. J. (2010). Corporate sustainability and innovation in SMEs: evidence of themes and activities in practice. *Business Strategy and the Environment*, 19(7), 417-435.
- Castka, P., Balzarova, M. A., Bamber, C. J., & Sharp, J. M. (2004). How can SMEs effectively implement the CSR agenda? A UK case study perspective. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 11(3), 140-149.



- Evans, N., & Sawyer, J. (2010). CSR and stakeholders of small businesses in regional South Australia. *Social Responsibility Journal*, 6(3), 433-451.
- Kocmanová, A., Dočekalová, M., Němeček, P., & Šimberová, I. (2011, July). Sustainability: environmental, social and corporate governance performance in Czech SMEs. In *The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics* (pp. 94-99).
- Lawrence, S. R., Collins, E., Pavlovich, K., & Arunachalam, M. (2006). Sustainability practices of SMEs: the case of NZ. *Business strategy and the environment*, 15(4), 242-257.
- Longo, M., Mura, M., & Bonoli, A. (2005). Corporate social responsibility and corporate performance: the case of Italian SMEs. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 5(4), 28-42.
- National Center for Sustainability Reporting (NCSR). 2017. GRI G4 certified training course GRI sustainability reporting process. Malang: NCSR.
- Perrini, F. (2006). SMEs and CSR theory: Evidence and implications from an Italian perspective. *Journal of business ethics*, 67(3), 305-316.
- Sarbutts, N. (2003). Can SMEs “do” CSR? A practitioner’s view of the ways small-and medium-sized enterprises are able to manage reputation through corporate social responsibility. *Journal of Communication Management*, 7(4), 340-347.